



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK



**SALATIGA SEHAT,
KELUARGA KUAT,
MASYARAKAT SEJAHTERA,
KOTA MAJU BERKEADILAN**

SALATIGA



MELINDUNGI KESEHATAN
MASYARAKAT



MELINDUNGI ANAK
DAN REMAJA



BERPIHAK KEPADA
RAKYAT KECIL



PENEGAKAN HUKUM
YANG ADIL DAN EDUKATIF



ANGGARAN TEPAT SASARAN,
MANFAAT NYATA BAGI RAKYAT

**MELAYANI
UNTUK →
SALATIGA**

Bersama
Membangun Salatiga
yang Sehat, Maju
dan Berkeadilan

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KOTA SALATIGA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;
Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Salatiga;
Yang kami hormati Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh tamu undangan;
Dan seluruh masyarakat Kota Salatiga yang kami hormati.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga dalam keadaan sehat.

I. PENDAHULUAN

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Salatiga pada prinsipnya **mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok** sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah melindungi kesehatan masyarakat.

Raperda ini memiliki dasar yang kuat. Naskah Akademik menegaskan bahwa tujuan KTR bukan hanya menciptakan kawasan bebas asap rokok, tetapi juga meningkatkan derajat kesehatan, mengurangi konsumsi rokok khususnya di kalangan masyarakat miskin, menekan jumlah perokok pemula, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Namun, Fraksi PKB memberikan catatan bahwa **Perda yang baik bukan hanya Perda yang memiliki banyak larangan dan sanksi, tetapi Perda yang mampu memberikan solusi dan manfaat nyata bagi masyarakat.**

Karena itu, pembahasan Raperda ini harus menggunakan pendekatan yang **tegas dalam perlindungan, tetapi humanis dalam pelaksanaan; kuat dalam pengawasan, tetapi adil terhadap rakyat kecil.**

II. KTR HARUS BERPIHAK PADA KESEHATAN DAN RAKYAT KECIL

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Fraksi PKB memandang persoalan rokok tidak hanya sebagai persoalan kesehatan, tetapi juga sebagai persoalan **ekonomi keluarga dan kemiskinan.**

Naskah Akademik mencatat bahwa konsumsi rokok menjadi salah satu komponen pengeluaran masyarakat yang besar dan berkaitan dengan persoalan kemiskinan. Bahkan, pengeluaran rokok dalam data yang digunakan Naskah Akademik disebut memiliki kontribusi signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga. Karena itu, Fraksi

PKB meminta agar implementasi KTR **jangan hanya berorientasi pada penindakan**. Pemerintah Kota harus hadir memberikan solusi.

Fraksi PKB mengusulkan :

Pertama, memperkuat layanan berhenti merokok di Puskesmas.

Kedua, memberikan edukasi pengelolaan ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga miskin yang memiliki anggota keluarga perokok.

Ketiga, mengintegrasikan kampanye berhenti merokok dengan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Keempat, memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang mudah dipahami mengenai dampak kesehatan dan ekonomi dari konsumsi rokok.

Dengan demikian, KTR tidak sekadar mengatakan “**dilarang merokok**”, tetapi juga memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang ingin berhenti.

III. ANAK DAN REMAJA HARUS MENJADI PRIORITAS

Fraksi PKB memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak dan remaja. Dengan hasil diskusi bersumber Naskah Akademik mencatat adanya persoalan peningkatan konsumsi rokok di kalangan anak dan remaja serta berkembangnya promosi produk rokok melalui media social, Bagi Fraksi PKB, ini merupakan persoalan serius.

Jangan sampai anak-anak kita menjadi sasaran pasar, sementara pemerintah baru bertindak ketika mereka sudah menjadi perokok.

Karena itu, Pemerintah Kota harus memperkuat:

1. pengawasan penjualan rokok kepada anak;
2. pengawasan iklan dan promosi produk tembakau;
3. edukasi bahaya rokok di sekolah;
4. keterlibatan orang tua dan keluarga;
5. kampanye hidup sehat;
6. pengawasan promosi melalui media digital;
7. serta penyediaan ruang publik yang sehat bagi anak dan remaja.

Dalam membedah Naskah Akademik dan diskusi Fraksi PKB juga menegaskan pentingnya perlindungan anak dari promosi, sponsor dan iklan rokok serta perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok.

IV. JANGAN SAMPAI PERDA KERAS KEPADA PEDAGANG KECIL

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Fraksi PKB ingin memberikan perhatian terhadap pelaku usaha kecil. Kita harus membedakan antara **industri besar dengan pedagang kecil, warung kelontong, pedagang pasar dan UMKM** yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari aktivitas perdagangan.

Jangan sampai implementasi Perda justru menambah beban masyarakat kecil. Karena itu kami meminta agar Pemerintah Kota memberikan:

- sosialisasi yang cukup;
- informasi aturan yang sederhana;
- pembinaan;
- masa transisi;
- dan pendekatan persuasif sebelum penerapan sanksi.

Prinsip kami jelas: **Jangan sampai Perda KTR menjadi aturan yang keras kepada wong cilik, tetapi lemah terhadap pelaku usaha besar dan promosi komersial.** Penegakan aturan harus **adil, proporsional dan tidak diskriminatif.**

V. PENEGAKAN HUKUM HARUS EDUKATIF

Fraksi PKB mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR.

Namun penegakan hukum harus dilaksanakan secara bertahap. Naskah Akademik telah memberikan ruang terhadap mekanisme teguran dan pembinaan sebelum penerapan sanksi yang lebih berat. Maka pendekatan yang kami dorong adalah:

Edukasi → Sosialisasi → Teguran → Pembinaan → Sanksi.

Jangan menjadikan jumlah denda sebagai ukuran keberhasilan Perda.

Ukuran keberhasilan Perda adalah semakin sedikit masyarakat yang merokok di kawasan terlarang, semakin sedikit anak yang menjadi perokok, semakin banyak masyarakat yang berhasil berhenti merokok, dan semakin sehat masyarakat Salatiga.

VI. PENGAWASAN HARUS NYATA, BUKAN SEKADAR ADMINISTRATIF

Raperda mengatur mengenai pembinaan, pengawasan dan pendanaan pelaksanaan KTR. Fraksi PKB meminta agar ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan. Satgas KTR jangan hanya dibentuk secara administratif.

Harus ada:

- target kerja;
- wilayah pengawasan;
- jadwal monitoring;
- mekanisme pengaduan;
- tindak lanjut laporan;
- serta evaluasi secara berkala.

Fraksi PKB juga mendorong pelibatan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan dan kader kesehatan. Naskah Akademik sendiri memberikan ruang yang cukup luas bagi partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaksanaan KTR.

KTR harus menjadi gerakan bersama masyarakat, bukan hanya pekerjaan Pemerintah Kota.

VII. ANGGARAN HARUS JELAS DAN TEPAT SASARAN

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Raperda menyebutkan bahwa pendanaan pelaksanaan KTR bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Fraksi PKB meminta agar anggaran tersebut digunakan secara efektif.

Prioritas anggaran harus diarahkan kepada:

1. edukasi dan sosialisasi;
2. layanan berhenti merokok;
3. perlindungan anak dan remaja;
4. pengawasan;
5. pembinaan masyarakat;
6. penguatan Puskesmas;
7. dan evaluasi pelaksanaan.

Kami tidak menghendaki anggaran besar hanya digunakan untuk kegiatan seremonial, pemasangan papan larangan atau kegiatan administratif.

Anggaran harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata.

VIII. PERTANYAAN DAN CATATAN STRATEGIS FRAKSI PKB

Berdasarkan uraian tersebut, Fraksi PKB meminta penjelasan Pemerintah Kota Salatiga mengenai beberapa hal:

1. Berapa target penurunan jumlah perokok di Kota Salatiga setelah Perda ini diberlakukan?
2. Berapa kebutuhan anggaran pelaksanaan KTR setiap tahun?
3. Bagaimana strategi Pemerintah Kota dalam melindungi anak dan remaja dari iklan, promosi dan penjualan rokok?
4. Bagaimana perlindungan terhadap pedagang kecil agar tidak menjadi korban penerapan aturan?
5. Apa program konkret untuk membantu masyarakat berhenti merokok?
6. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi Satgas KTR?
7. Bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelanggaran KTR?
8. Apa indikator keberhasilan Perda setelah satu tahun pelaksanaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar Perda ini tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi memiliki **target, anggaran, program dan hasil yang dapat diukur**.

IX. SIKAP FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Setelah mencermati Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik tentang Kawasan Tanpa Rokok, **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Salatiga pada prinsipnya dapat menerima dan mendukung Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut**, dengan sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian dalam pembahasan bersama.

Fraksi PKB menegaskan lima prinsip utama:

Pertama, KTR harus berorientasi pada **perlindungan kesehatan masyarakat**.

Kedua, KTR harus memberikan **perlindungan khusus kepada anak dan remaja**.

Ketiga, KTR harus berpihak kepada **masyarakat kecil dan keluarga miskin**.

Keempat, Penegakan hukum harus dilakukan secara **adil, edukatif, bertahap dan tidak diskriminatif**.

Kelima, Setiap rupiah anggaran harus memberikan **manfaat nyata bagi masyarakat**.

X. PENUTUP

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Fraksi PKB berpandangan bahwa pembangunan Kota Salatiga tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik.

Pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan rakyat: **rakyat sehat, rakyat mendapatkan pelayanan yang baik, keluarga semakin kuat, anak-anak terlindungi, dan masyarakat kecil semakin sejahtera.**

Karena itu, Fraksi PKB mengajak seluruh pihak menjadikan Raperda KTR sebagai bagian dari ikhtiar membangun **Salatiga yang sehat, maju dan berkeadilan.**

Jangan hanya membuat aturan. **Pastikan aturan memberikan solusi.**

Jangan hanya memberikan sanksi. **Berikan masyarakat pendampingan dan jalan keluar.**

Jangan hanya melindungi mereka yang kuat. **Pastikan masyarakat kecil mendapatkan perlindungan yang utama.**

Dan jangan hanya mengejar keberhasilan administratif. **Ukur keberhasilan dari perubahan nyata dalam kehidupan rakyat.**

Karena bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: **“Kebijakan publik harus hadir bukan untuk mempersulit rakyat, tetapi untuk melindungi, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Salatiga.

Semoga pembahasan Raperda ini menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas, adil, implementatif dan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Salatiga.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salatiga, 18 Agustus 2026

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Ketua : Ahmad Musadad

Wk. Ketua : H. Basirin

Sekretaris : Eko Purnomo

Anggota : 1. Saiful Mashud, S.Sos.I

2. M. Miftah, SE



Handwritten signatures of the members of the Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Salatiga, corresponding to the list of names provided on the left.